



Manajemen Informasi Administrasi dan Kearsipan Menggunakan Aplikasi SRIKANDI dalam Pelayanan Publik di Setjen DPR RI

Elisabeth Sonia Asa¹, Yoakim Rembu^{2*}

Universitas Timor, Indonesia

Email: elisabethasa7@gmail.com¹, s2yoakimrembu@gmail.com²

Alamat Jln. Km 9, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu

Korespondensi penulis: s2yoakimrembu@gmail.com*

Abstract. *The Srikandi application is an electronic-based management information system designed to support digital transformation in administration and archiving to enhance efficiency, transparency, and accountability in public services, particularly within the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives (Setjen DPR RI). This study aims to analyze the implementation of the Srikandi application, evaluate its impact on work efficiency and service quality, and identify the main challenges in its adoption. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. The findings indicate that the Srikandi application has successfully improved administrative efficiency through features such as electronic signatures and real-time document tracking, as well as supporting the restructuring of organizational work processes. However, several key challenges remain, including slow system performance, low user competence, resistance to new technology, limited accessibility for the public, and data security risks. The implications of this study highlight the importance of enhancing user competence through training, optimizing technological infrastructure, and strengthening data security policies. This study is expected to serve as a reference for other government institutions in adopting digital technologies to support more responsive and accountable public services.*

Keywords: *Information Management, Administration and Archiving, Public Service.*

Abstrak. Aplikasi Srikandi merupakan sistem informasi manajemen berbasis elektronik yang dirancang untuk mendukung transformasi digital dalam administrasi dan kearsipan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, khususnya di Setjen DPR RI. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi Srikandi, mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi kerja dan kualitas layanan, serta mengidentifikasi kendala utama dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Srikandi berhasil meningkatkan efisiensi administrasi melalui fitur tanda tangan elektronik dan pelacakan dokumen secara real-time, serta mendukung restrukturisasi proses kerja organisasi. Namun, terdapat kendala utama, seperti performa sistem yang lambat, rendahnya kompetensi pengguna, resistensi terhadap teknologi baru, keterbatasan aksesibilitas bagi masyarakat, dan risiko keamanan data. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kompetensi pengguna melalui pelatihan, optimalisasi infrastruktur teknologi, serta penguatan kebijakan keamanan data. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lain dalam mengadopsi teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Kata kunci: Manajemen Informasi, Administrasi dan Kearsipan, Pelayanan Publik.

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Seiring dengan berkembangnya era digital, pemerintah di Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk mengadopsi teknologi informasi guna mendukung efisiensi administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), merupakan langkah strategis dalam mencapai prinsip *good governane*.

Aplikasi SRIKANDI dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan arsip dan administrasi secara elektronik dengan mendukung proses digitalisasi dokumen. Dalam konteks Sekretariat Jenderal DPR RI, implementasi aplikasi ini menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal, transparansi pelayanan, dan aksesibilitas informasi publik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam teori Sistem Informasi Manajemen oleh Laudon & Laudon (2018), keberhasilan implementasi sistem informasi memerlukan integrasi yang baik antara teknologi, organisasi, dan manusia. Namun, beberapa kendala, seperti rendahnya kompetensi pengguna, resistensi terhadap teknologi baru, dan isu keamanan data, sering kali menghambat optimalisasi aplikasi ini.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI, yang memiliki karakteristik administrasi dan pelayanan publik yang kompleks. Penelitian sebelumnya menunjukkan potensi besar aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik. Studi Adra (2023) dan Simbolon (2019) menemukan bahwa digitalisasi kearsipan dapat mengurangi waktu pemrosesan dokumen secara signifikan. Rahmadani (2024) menyoroti pentingnya penyesuaian infrastruktur teknologi dan pelatihan pengguna sebagai faktor keberhasilan implementasi aplikasi SPBE. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengevaluasi implementasi aplikasi SRIKANDI dalam lingkungan Setjen DPR RI, yang memiliki kompleksitas administratif dan kebutuhan pelayanan publik yang unik.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai penerapan aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI dengan menyoroti tantangan spesifik seperti resistensi pengguna terhadap teknologi, kendala teknis, dan kebutuhan optimalisasi fitur aplikasi. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara sistem informasi manajemen, efisiensi internal, dan kualitas pelayanan publik, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan penerapan aplikasi SRIKANDI di sektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI dalam mendukung administrasi dan kearsipan berbasis elektronik, mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi kerja dan pelayanan publik, serta mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur mengenai sistem

informasi manajemen di sektor publik, tetapi juga panduan praktis bagi instansi pemerintah lainnya untuk mengadopsi teknologi serupa dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur tentang e-government dan Sistem Informasi Manajemen di sektor publik, serta manfaat praktis berupa panduan kebijakan dan strategi implementasi aplikasi di instansi pemerintah lainnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada teori Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikemukakan oleh Laudon & Laudon (2018). Menurut Laudon & Laudon (2018), sistem informasi manajemen adalah kombinasi dari teknologi, organisasi, dan manusia yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Menurut mereka, keberhasilan suatu sistem informasi bergantung pada integrasi tiga dimensi utama, yaitu teknologi, organisasi, dan manusia.

Sistem informasi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi internal dan kualitas pelayanan eksternal melalui integrasi teknologi yang mendukung otomatisasi proses kerja, pengelolaan data, serta pengambilan keputusan berbasis informasi. Dalam konteks penelitian ini, aplikasi SRIKANDI yang diterapkan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) menjadi studi kasus implementasi SIM untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan berbasis elektronik.

Dalam konteks aplikasi SRIKANDI, teori ini diaplikasikan melalui penerapan teknologi seperti tanda tangan elektronik, pelacakan dokumen secara real-time, dan klasifikasi arsip terintegrasi. Dimensi manusia mencakup pelatihan dan peningkatan kompetensi pengguna untuk memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan dimensi organisasi melibatkan restrukturisasi proses administrasi dan kearsipan untuk mendukung pengelolaan dokumen berbasis elektronik.

Aplikasi SRIKANDI menjadi contoh penerapan SIM dalam konteks administrasi publik, yang bertujuan untuk mempercepat proses pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif di Setjen DPR RI.

Penerapan aplikasi SRIKANDI mendukung prinsip-prinsip e-government. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), yang mendorong pengelolaan arsip dan administrasi secara digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prinsip good governance dalam pelayanan publik meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas (UNDP, 1997). Teknologi informasi, seperti aplikasi SRIKANDI, menjadi alat strategis untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan menyediakan akses real-time terhadap dokumen dan fitur pelacakan digital, aplikasi ini mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi hambatan birokrasi.

Namun, resistensi terhadap teknologi baru dan rendahnya literasi digital di kalangan pegawai sering kali menjadi hambatan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, teori adopsi teknologi (Technology Acceptance Model/TAM) oleh Davis (1989) relevan untuk menjelaskan bagaimana persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan memengaruhi adopsi teknologi.

Teori sistem informasi Laudon & Laudon juga relevan dalam mengkaji bagaimana teknologi informasi dapat diintegrasikan dalam administrasi dan kearsipan. Dalam kasus aplikasi SRIKANDI, integrasi ini mendukung efisiensi dengan mengotomatisasi alur kerja administratif dan pengelolaan arsip. Hal ini sejalan dengan temuan Adra (2023), yang menyebutkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis elektronik dapat mengurangi waktu pemrosesan dokumen hingga 50%.

Penelitian sebelumnya Adra (2023), menyatakan bahwa penggunaan aplikasi seperti SRIKANDI dapat mengurangi waktu pemrosesan dokumen. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pelatihan pengguna dan dukungan infrastruktur yang memadai. Rahmadani (2024), mengemukakan pentingnya stabilitas sistem dan penambahan fitur notifikasi otomatis untuk meningkatkan efisiensi aplikasi, terutama dalam konteks e-government. Simbolon (2019), fokus pada analisis teknologi dan manajemen informasi, menekankan perlunya integrasi yang kuat antara teknologi, proses, dan sumber daya manusia dalam suatu sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yuliah (2024), menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan aplikasi arsip elektronik secara maksimal.

Penelitian ini secara implisit menyatakan bahwa: Penerapan aplikasi SRIKANDI dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik jika tiga dimensi teori Laudon & Laudon dioptimalkan secara simultan, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur teknologi, memperbaiki proses organisasi, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Kendala utama yang perlu diatasi untuk mencapai hasil optimal termasuk resistensi pengguna, masalah teknis, serta kebutuhan akan pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan.

Kajian teoritis ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi seperti SRIKANDI bergantung pada keselarasan antara teknologi, organisasi, dan manusia. Selain itu, penguatan literasi digital, optimalisasi infrastruktur teknologi, dan restrukturisasi proses organisasi menjadi faktor penting untuk mendukung penerapan sistem informasi dalam pelayanan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi aplikasi SRIKANDI di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, survei kepada masyarakat pengguna layanan, dan analisis dokumen. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak aplikasi SRIKANDI terhadap efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi pelayanan publik.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Setjen DPR RI, termasuk tenaga sistem pembantu (TSP) dan kepala bagian arsip, untuk menggali pemahaman mereka tentang implementasi aplikasi, kendala yang dihadapi, dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik. Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan perspektif eksternal terkait aksesibilitas dan transparansi layanan yang didukung oleh aplikasi SRIKANDI. Survei masyarakat dirancang dengan indikator yang mencakup kepuasan terhadap waktu pemrosesan dokumen, kemudahan akses informasi, dan persepsi mereka terhadap akuntabilitas layanan publik.

Pengamatan langsung dilakukan selama lima bulan, mulai dari Februari hingga Juni 2024, di lingkungan kerja Setjen DPR RI selama masa magang peneliti berlangsung. Observasi partisipatif memfokuskan pada interaksi pengguna (pegawai) dengan aplikasi, termasuk bagaimana aplikasi memengaruhi proses administrasi harian seperti surat-menyurat, pengarsipan dokumen, dan pelacakan arsip. Hasil pengamatan ini dibandingkan dengan umpan balik dari masyarakat untuk memahami sejauh mana peningkatan efisiensi internal berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen resmi, seperti laporan internal Setjen DPR RI tentang implementasi aplikasi SRIKANDI, kebijakan SPBE, dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020. Dokumen ini digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai yang menggunakan aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI serta masyarakat yang menerima layanan terkait. Sampel dipilih secara purposif, yaitu pegawai dari berbagai unit kerja yang relevan dengan implementasi aplikasi dan masyarakat pengguna layanan yang teridentifikasi melalui data arsip digital. Sampel dipilih secara purposif untuk memastikan keterwakilan dari berbagai unit kerja di Setjen DPR RI, seperti tenaga sistem pembantu (TSP), kepala bagian arsip, serta staf administrasi. Di sisi lain, masyarakat yang menjadi responden survei adalah pengguna layanan yang teridentifikasi melalui data arsip elektronik, seperti mereka yang mengakses dokumen publik atau menggunakan layanan surat-menyurat secara digital.

Pengolahan data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Data dari wawancara, observasi, survei, dan dokumen dibandingkan untuk menemukan pola atau kesesuaian. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi dampak aplikasi terhadap tiga indikator utama pelayanan publik: efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi.

Efisiensi diukur melalui waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen sebelum dan setelah implementasi aplikasi. Aksesibilitas dievaluasi berdasarkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik, seperti status dokumen mereka. Transparansi dinilai melalui kemampuan masyarakat melacak proses administrasi secara real-time dan persepsi mereka terhadap kejelasan prosedur.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi kerja internal tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai kualitas layanan. Temuan dari wawancara dan survei masyarakat menunjukkan bahwa keterlambatan pemrosesan dokumen publik berkurang, akses terhadap informasi meningkat, dan kepercayaan terhadap transparansi layanan bertambah. Observasi pada pegawai menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI berhasil menyederhanakan proses administrasi, meskipun beberapa kendala teknis, seperti kelemotan sistem dan kurangnya pelatihan pengguna, masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan gambaran yang holistik mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan SPBE di masa depan dan menjadi acuan bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana aplikasi SRIKANDI tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi internal tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan eksternal kepada masyarakat. Misalnya, temuan menunjukkan bahwa penerapan aplikasi ini mengurangi waktu pemrosesan dokumen dan meningkatkan transparansi prosedur layanan. Survei masyarakat juga menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap instansi karena mereka dapat melacak status dokumen secara real-time.

Desain penelitian ini memastikan bahwa dampak aplikasi SRIKANDI terhadap pelayanan publik dievaluasi secara menyeluruh, baik dari perspektif internal organisasi maupun eksternal masyarakat. Pendekatan yang digunakan diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan SPBE dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital di instansi pemerintah.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI berhasil meningkatkan efisiensi administrasi di Setjen DPR RI melalui penerapan teknologi tanda tangan elektronik dan klasifikasi arsip dinamis. Waktu pemrosesan dokumen menurun rata-rata 30% dibandingkan metode manual, meskipun kendala teknis seperti kelemotan sistem masih memengaruhi performa aplikasi. Dari perspektif organisasi, aplikasi ini mendukung integrasi proses administrasi antarunit kerja, yang tercermin dari peningkatan koordinasi dalam pengelolaan dokumen. Namun, resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Dari dimensi manusia, hasil wawancara menunjukkan bahwa 70% pegawai merasa memerlukan pelatihan tambahan untuk memanfaatkan fitur aplikasi secara maksimal. Survei masyarakat menunjukkan bahwa 85% responden merasa puas dengan transparansi layanan, terutama kemampuan melacak dokumen secara real-time. Namun, 15% responden mengeluhkan aksesibilitas yang masih terbatas, terutama bagi pengguna yang kurang familier dengan teknologi.

Penelitian ini mendukung temuan Adra (2023) yang menunjukkan pentingnya pelatihan dan penguatan infrastruktur teknologi dalam implementasi aplikasi berbasis SPBE. Selain itu, penelitian ini memperluas literatur dengan mengeksplorasi hubungan antara efisiensi kerja internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang belum dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya.

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan teknis bagi pegawai, pengembangan fitur aksesibilitas untuk masyarakat, dan perbaikan infrastruktur teknologi guna mengatasi kendala teknis. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja internal tetapi juga memberikan dampak signifikan pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Namun, aplikasi ini menghadapi kendala teknis, seperti kecepatan sistem yang sering melambat saat beban tinggi, maintenance berulang, dan kesalahan pada fitur TTE, yang berdampak pada produktivitas kerja.

Tabel 1. Fitur Teknologi Aplikasi SRIKANDI dan Dampaknya

Fitur Teknologi	Fungsi	Dampak
Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Mempercepat verifikasi dokumen	Pengurangan waktu 40% dalam proses verifikasi
Klasifikasi Arsip Dinamis	Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori	Pencarian dokumen lebih efisien (30% lebih cepat)
Log Dokumen	Memantau status dokumen secara real-time	Transparansi meningkat, dokumen lebih mudah dilacak

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Implementasi SRIKANDI telah mengubah proses administrasi di Setjen DPR RI dengan:

- a. Otomatisasi Tugas Administratif: Penyederhanaan alur kerja, seperti pengiriman dokumen yang sebelumnya manual menjadi otomatis.
- b. Koordinasi Antarunit Kerja: Sistem pengarsipan terintegrasi memudahkan komunikasi antarunit dalam melacak dokumen.

Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kebijakan yang mendukung adopsi aplikasi menjadi hambatan utama.

Tabel 2. Perubahan Organisasi Sebelum dan Sesudah Implementasi SRIKANDI

Aspek	Sebelum	Sesudah
Proses Administrasi	Manual, membutuhkan waktu yang lama	Otomatis Lebih Cepat dan efisien
Kordinasi Antarunit	Terbatas, sulit melacak dokumen	Terintegrasi Pelacakan Lebih Mudah
Resistensi Pegawai	Tinggi	Mulai berkurang dengan pelatihan rutin

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Survei Internal Pegawai: 65% merasa kurang kompeten menggunakan aplikasi karena minim pelatihan, sementara 35% lainnya mulai terbiasa dan merasa aplikasi membantu tugas harian.

Perspektif Pengguna Layanan: 70% masyarakat merasa puas dengan transparansi dokumen, tetapi 30% mengeluhkan waktu respons aplikasi

Tabel 3. Respon Pengguna terhadap Aplikasi SRIKANDI

Kelompok Responden	Tanggapan Positif	Tanggapan Negatif
Pegawai Setjen DPR RI	Efisiensi Meningkat (35%)	Kesulitan adaptasi teknologi (60%)
Masyarakat Penghuna	Transparansi Tinggi (70%)	Waktu respon lambat (30%)

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Tabel 4. Indikator Pelayanan Publik Sebelum dan Sesudah Implementasi

Indikator	Sebelum Implementasi	Sebelum Implementasi
Waktu Pemrosesan	5 hari	2 hari
Pelacakan Dokumen	Tidak tersedia	Real-time tracking tersedia
Transparansi	Tidak ada publikasi alur kerja	Publikasi Alur Kerja di aplikasi

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Penelitian oleh Simbolon (2019) dan Rahmadani (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasi serupa di sektor publik bergantung pada pelatihan pengguna dan penguatan infrastruktur teknologi. Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut, namun juga menyoroti pentingnya fitur notifikasi otomatis untuk meningkatkan efisiensi aplikasi.

Pembahasan

Implementasi teknologi informasi di sektor publik, seperti penggunaan aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI, adalah langkah penting untuk menciptakan efisiensi administrasi dan pengelolaan arsip berbasis elektronik. Berdasarkan teori Sistem Informasi Manajemen oleh Laudon & Laudon (2018), sistem informasi adalah kombinasi teknologi, manusia, dan proses yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Implementasi aplikasi SRIKANDI mencerminkan definisi ini dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses administrasi dan kearsipan pemerintah.

Efisiensi Administrasi dan Dampak Pelayanan Publik

Implementasi aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen yang efektif dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus berdampak signifikan pada kualitas pelayanan publik. Berdasarkan teori Laudon & Laudon (2018), keberhasilan sistem informasi terletak pada integrasi tiga dimensi utama: teknologi, organisasi, dan manusia. Dalam konteks penelitian ini, aplikasi SRIKANDI menjadi contoh nyata bagaimana ketiga dimensi tersebut memengaruhi capaian tujuan pelayanan publik.

“Sistem Informasi Manajemen adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan prosedur yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi.” (Laudon & Laudon, 2018: Management Information Systems: Managing the Digital Firm). Dalam buku tersebut, Laudon

juga menekankan bahwa sistem informasi manajemen harus mendukung tiga dimensi utama, yaitu:

a. Dimensi Teknologi

Aplikasi SRIKANDI, sebagai komponen teknologi, telah menyediakan fitur-fitur utama seperti tanda tangan elektronik, klasifikasi arsip dinamis, dan log pelacakan dokumen. Fitur-fitur ini terbukti mengurangi waktu pemrosesan dokumen hingga 30% dibandingkan metode manual. Hal ini menunjukkan bahwa otomatisasi berbasis teknologi dapat mendukung efisiensi administrasi. Namun, kendala teknis seperti kelemotan sistem dan insiden gangguan teknis menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Masalah ini tidak hanya mengurangi produktivitas internal tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kecepatan dan keandalan layanan.

Hasil ini mendukung temuan Rahmadani (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam pelayanan publik bergantung pada stabilitas dan keandalan sistem. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penguatan infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kapasitas server dan pengurangan waktu pemeliharaan sistem, merupakan langkah penting untuk meningkatkan dampak teknologi pada pelayanan publik. Penguatan infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kapasitas server dan pengurangan waktu pemeliharaan sistem, penting untuk meningkatkan keandalan sistem dan mendukung stabilitas layanan.

b. Dimensi Organisasi

Dari perspektif organisasi, implementasi aplikasi SRIKANDI memengaruhi proses administratif di Setjen DPR RI dengan menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan koordinasi antarunit. Sebagai contoh, log digital memungkinkan pelacakan dokumen secara real-time, sehingga mengurangi redundansi dan meningkatkan transparansi prosedur. Namun, resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai, terutama mereka yang terbiasa dengan sistem manual, menjadi kendala dalam optimalisasi aplikasi ini.

Penelitian ini mendukung pandangan Laudon & Laudon (2018) bahwa restrukturisasi organisasi diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi baru. Hal ini mencakup adaptasi kebijakan internal, pelatihan, dan dukungan manajerial yang konsisten untuk memfasilitasi transisi dari sistem manual ke digital. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi dapat lebih optimal

jika ada penyesuaian kebijakan yang mendorong penggunaan aplikasi sebagai alat utama dalam pengelolaan administrasi. Restrukturisasi organisasi, adaptasi kebijakan, dan pelatihan internal diperlukan untuk mendukung transisi ke sistem digital yang lebih efektif.

c. Dimensi Manusia

Dimensi manusia memainkan peran kunci dalam keberhasilan aplikasi SRIKANDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kompetensi pegawai dalam menggunakan aplikasi masih beragam. Sebagian besar pegawai menyatakan perlunya pelatihan tambahan untuk memaksimalkan pemanfaatan fitur aplikasi. Survei masyarakat juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap transparansi dan aksesibilitas layanan meningkat setelah penerapan aplikasi. Sebanyak 85% responden merasa bahwa aplikasi ini membantu mereka melacak dokumen secara real-time, sementara 15% mengeluhkan aksesibilitas yang terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Yuliah (2024), yang menekankan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan adopsi teknologi di sektor publik. Namun, penelitian ini memperluas diskusi dengan menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak hanya bergantung pada pelatihan tetapi juga pada dukungan teknis berkelanjutan dan pengembangan fitur yang ramah pengguna untuk masyarakat. Program pelatihan intensif dan dukungan teknis berkelanjutan menjadi solusi utama untuk memastikan pegawai mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik.

Dampak dan Kendala dalam Pelayanan Publik

Implementasi aplikasi SRIKANDI memberikan dampak positif terhadap tiga indikator utama pelayanan publik:

a. Indikator Pelayanan Publik

Penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam pelayanan publik memberikan dampak positif, dimana mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan transparansi.

(1) **Efisiensi**. Digambarkan dengan waktu pemrosesan dokumen berkurang hingga 40%, terutama pada proses surat-menyurat dan pengarsipan dinamis. (2) **Aksesibilitas**, digambarkan melalui masyarakat dapat melacak status dokumen secara online, meningkatkan kemudahan akses informasi dan dapat melakukan pengaduan secara online tanpa harus ke kantor dan (3) **Transparansi** dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI digambarkan melalui log digital

memungkinkan masyarakat memahami proses administratif, meningkatkan kepercayaan terhadap instansi.

b. Kendala Implementasi

Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI selain memberikan dampak positif dalam penggunaannya aplikasi SRIKANDI ini juga memiliki kendala dalam proses implementasinya yang terkadang menghambat proses pelayanan publik. Kendala tersebut seperti (1)**Keamanan Data**, Kebocoran data menunjukkan perlunya protokol keamanan yang lebih kuat, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor. Kebocoran data yang pernah terjadi pada Juni 2024 menunjukkan bahwa sistem masih membutuhkan protokol keamanan yang lebih kuat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-government. (2)**Adaptasi Pengguna**, dalam proses adaptasi beberapa pegawai seperti Pegawai senior kesulitan memahami fitur aplikasi, sehingga beberapa proses masih dilakukan manual. Beberapa pengguna, kesulitan dalam memahami fitur-fitur aplikasi. Ini mengakibatkan beberapa proses masih dilakukan secara manual, yang mengurangi efektivitas aplikasi dan (3)**Stabilitas Sistem**, dalam stabilitas Sistem sering mengalami kendala teknis seperti lemot dan maintenance yang terlalu sering, sehingga mengganggu kelancaran pelayanan. Seringnya gangguan teknis mengurangi efektivitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur sistem informasi manajemen dan berimplikasi praktis dalam pengembangan aplikasi e-government di sektor publik. Penekanan pada perbaikan teknis dan pelatihan akan memastikan aplikasi SRIKANDI menjadi model unggulan dalam e-government di Indonesia.

Studi sebelumnya oleh Simbolon (2019) dan Yuliah (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi di sektor publik sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan manajerial. Hal ini sejalan dengan temuan di Setjen DPR RI, di mana kendala utama muncul dari aspek teknis dan sumber daya manusia.

Selain itu, penelitian Rahmadani (2024) menyoroti pentingnya notifikasi otomatis dalam aplikasi e-government untuk meningkatkan responsivitas pengguna. Temuan ini relevan dengan harapan pegawai Setjen DPR RI agar aplikasi Srikandi menyediakan fitur notifikasi otomatis.

Implementasi aplikasi Srikandi di Setjen DPR RI merupakan langkah strategis dalam mendukung good governance melalui penerapan e-government. Meski terdapat kendala, potensi aplikasi ini dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan arsip sangat besar. Dengan perbaikan teknis dan manajerial, aplikasi Srikandi dapat menjadi model inovasi teknologi yang sukses di sektor publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan manajemen informasi melalui aplikasi (Adra & Permana, 2023) SRIKANDI di Setjen DPR RI memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan publik. Efisiensi terukur dari pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen, sementara aksesibilitas terbukti meningkat dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik secara digital. Transparansi juga terjamin melalui kemampuan masyarakat untuk melacak status dokumen dan proses administrasi secara real-time, serta persepsi positif terhadap kejelasan prosedur yang ada. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti kebutuhan peningkatan pelatihan bagi pegawai dan masyarakat terkait penggunaan aplikasi, serta adanya kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk mendukung operasional aplikasi secara lebih maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Setjen DPR RI terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkala terhadap aplikasi SRIKANDI, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur teknologi dan kapasitas SDM. Selain itu, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan aplikasi dengan lebih efektif. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis lebih mendalam terkait pengalaman pengguna, baik pegawai maupun masyarakat, untuk mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang terbatas, sehingga hasilnya belum sepenuhnya dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan lebih beragam sangat dianjurkan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses pembuatan artikel ini, terutama kepada pegawai Arsip Setjen DPR RI, mentor magang, dosen, keluarga, teman-teman atas dukungan dan motivasinya. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Adra, A., & Permana, I. (2023). Pemanfaatan aplikasi Srikandi bagi pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(01), 1–12. <https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5807>
- Apriana Irawati, Fadli, S., Sunardi, S., Efendi, M. M., & Haryanto, E. (2024). Pelatihan transformasi digital arsip di Desa Darmaji menggunakan Google Drive. *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 01–09. <https://doi.org/10.61132/bumi.v2i3.134>
- DPR RI. (2024). Profil Setjen DPR RI dan sistem kearsipan elektronik. <https://www.dpr.go.id/id/setjen/tentang-setjen>
- DPR, Arsip Sekretariat Jenderal. (2020). *Klasifikasi arsip DPR RI*. Jakarta.
- DPR, Arsip Sekretariat Jenderal. (2021). *Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta.
- Kartiana, R. F. (2024). Hak cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-pemerintahan-digital-tim-koordinasi-spbe->
- Kemendagri. (2023). *Implementasi sistem kearsipan nasional*. <https://kemendagri.go.id>
- Kementerian PANRB. (2020). *Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI)*. <https://menpan.go.id>
- Kementerian PANRB. (2023). *Evaluasi implementasi SPBE di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management information systems: Managing the digital firm*. Pearson Education.
- Mulyadi. (2007). *Sistem informasi manajemen*. Salemba Empat.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management information systems*. McGraw-Hill Higher Education.
- Portal Layanan. (2024). Srikandi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. <https://portal.layanan.go.id/dashboard/srikandi>
- Publik, A., & Administrasi, J. I. (n.d.). Efektivitas pelayanan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Millenia 1, Harapan Tua RFS 2. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(15), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8214031>
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2024). *Laporan implementasi aplikasi Srikandi di Setjen DPR RI*. Jakarta: Setjen DPR RI.
- Simbolon, & Chotijah, U. (2022). Sistem informasi manajemen layanan kearsipan (SI MALAK) berbasis web. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v10i3.2701>